

Melihat Poros Radikalisme di Tubuh Pendidikan dan Tafsir Remoderasinya

written by Harakatuna



Bukan barang aneh dan baru di tubuh pendidikan tercemari paham radikalisme. Keterlibatan dan bersemayam paham radikal sudah lama dan nampaknya seolah menjadi model di dalam sebagian institusi pendidikan di Indonesia.

Toto Suharto melihat faktor gejala demikian. Menurutnya, [pendidikan](#) Islam Indonesia yang dulunya toleran, menjadi intoleran. Yang dulunya santri/anak didik/orang/kelompok/organisasi ramah, bergeser menjadi marah. Yang dulunya inklusif menjadi eksklusif. Yang dulunya moderat menjadi ekstrem/radikal. Demikian itu terjadi di lembaga-lembaga seperti pendidikan Islam swasta transnasional, atau lembaga pendidikan berbasis masyarakat organik yang mandiri dan otonomi kebijakannya, seperti madrasah, sekolah Islam, dan pesantren (Toto Suharto, 2020).

Faktor Radikalisme di Pendidikan

Fenomena itu menjadi kegelisahan kita semua. Selama ini kita melihat dan menemukan beberapa perubahan yang mencemaskan, mungkin memiriskan di dunia pendidikan: madrasah, sekolah [Islam](#), dan pesantren. Dari padanya, sebagian telah terjadi pertarungan ideologis yang mengarah pada konservatisme Islam. Bahkan, pertarungan ideologi ini menghapus “citra” atau “norma baik” yang dimiliki lembaga itu, yang dulunya berfungsi sebagai pengawal moderasi Islam dan mencerdaskan manusia yang toleran, malah sebaliknya: konservatif.

Mengapa itu terjadi? Kalau kita lacak genealogisnya, karena pendidikan swasta yang di kelola oleh organisasi/yayasan tertentu memiliki jejaring Islam transnasional, memiliki ideologi tersembunyi (ideologi Salafi yang menginginkan negara Islam dan penerapan syariah dan ajang kontestasi politik praktis), dan lembaga ini lepas dari pengawasan pemerintah (Toto Suharto, 2020).

Sementara itu, juga dari ekspor ekspansi ajaran wahabi dan propoganda politik bungkus Islam yang dipraktikkan Arab Saudi selama ini, dengan cara menyponsori kebutuhan sosial umat: misalnya pengadaan pembangunan madrasah, masjid, dan memberi bantuan beasiswa (M. Khalid Syeirazi, 2020).

Bukti dari adanya ideologi radikalisme tersembunyi itu adalah, lembaga-lembaga ini secara samar menerima Pancasila meski hanya sebagai *taqiyyah* saja, agar pendidikannya tetap eksis, menolak mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang memuat Pancasila, dan bahkan di ekstrakurikuler seperti Pramuka, ideologi tersembunyi itu gencar diajarkan di beberapa materinya.

Radikalisme menjadi barang yang harus dihanguskan. Oleh sebab itu dalam berbagai teks literatur akademis pendidikan Islam banyak menawarkan rekomendasi yang, saya rumuskan menjadi tiga bagian. Sehingga semua pendidikan di Indonesia (pesantren, sekolah, kampus dan sejenisnya) menjadi lembaga pendidikan moderat yang menciptakan insan-insan cendekia santun, dan saling menguatkan kaki NKRI dari gempuran paham, ajaran, pendidikan kelompok ekstem.

Remoderasi Pendidikan: sebuah Tafsir

Pertama, merumuskan tujuan pendidikan Islam moderat. Karena tujuan pendidikan diharapkan menciptakan hasil yang baik atau menghasilkan lembaga pendidikan yang moderat, maka rumusan tujuan pendidikan harus memperhatikan konsep dan filsafat “baik”, dalam arti etiket (adab-sopan santun), *conduct* (prilaku terpuji), *virtualis* (watak terpuji), *practical values*, dan *living values*. Rumusan tujuan lembaga pendidikan Islam setidaknya memuat empat hal: (1) komitmen kebangsaan; (2) toleransi; (3) anti kekerasan; (4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Toto berharap keempat rumusan diatas dapat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan Islam di Indonesia.

Kedua, merancang kurikulum pendidikan Islam moderat. Melihat materi pendidikan tersebar lewat media cetak dan digital, dan ini juga dilakukan oleh

kelompok Islam transnasional, maka kurikulum pendidikan moderat harus memuat di antaranya pemahaman Islam moderat, yaitu:

Pemahaman bahwa ajaran Islam itu normal, tidak memudahkan juga tidak memberatkan. Pemahaman bahwa Islam agama toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Pemahaman bahwa Islam sangat kooperatif terhadap perbedaan pendapat. Pemahaman bahwa Islam agama tidak menolerir terhadap kekerasan. Pemahaman bahwa Islam agama yang mengandung demokrasi untuk kemaslahatan umat. Pemahaman bahwa Islam agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Pemahaman bahwa Islam menganjurkan berpikir rasional berdasarkan wahyu. Pemahaman bahwa dalam menafsirkan teks-teks Qur'an dan Sunnah tidak hanya theosentris tetapi juga harus antroposentris dan kontekstual (Aksin Wijaya, 2018). Pemahaman bahwa Islam memetingkan Ijtihad dalam menafsirkan apa yang termaktub dalam Qur'an dan Sunnah (Toto Suharto, 2020).

Ketiga, menginternalisasikan Islam moderat dalam kurikulum tersembunyi. Karena ajaran tersembunyi (tidak tertulis dalam dokumen kurikulum) sangat efektif dalam membentuk watak dan kepribadian peserta didik, maka penyelenggara pendidikan harus menginternalisasikan norma-nilai keislaman dan keindonesiaan (Pencasila), baik melalui proses intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler.

Bila nilai di atas dapat diinternalisasikan dalam proses pendidikan santri dan umum lainnya, yang merupakan abstraksi dari paham Islam moderat, maka akan menjadi karakter Islam Indonesia. Sebab, pengetahuan Islam moderat memungkinkan dapat menjadi *official knowlegde*. Bahkan mungkin menentukan arah masa depan Islam Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dan dimulai oleh santri. Karena, selain sebagai mayoritas dan punya akar sejarah yang kuat, juga menjadi pandu anatomi kontestasi Islam dan penangkal gerakan ekstremisme di Indonesia, baik melalui proyek "Islam Nusantara" dan jalan kulturalnya.